

**DAMPAK RELOKASI IBUKOTA KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI PENDUDUK DI
KENAGARIAN PARIT MALINTANG
KECAMATAN ENAM LINGKUNG**

SKRIPSI

untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sains



**YOPPIE ELYMBRA OKTARINI
NIM 2010/18487**

**PROGRAM STUDI GEOGRAFI
JURUSAN GEOGRAFI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2016**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

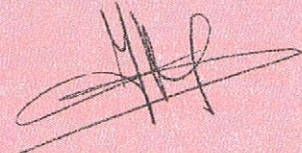
SKRIPSI

Judul : Dampak Relokasi Ibukota Kabupaten Padang Pariaman
Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk di Kenagarian
Parit Malintang Kecamatan Enam Lingsung
Nama : Yoppie Elymbra Oktarini
Nim : 18487 / 2010
Program Studi : Geografi
Jurusan : Geografi
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Februari 2016

Disetujui oleh:

Pembimbing I,



Dra. Yurni Suasti, M.Si
NIP. 19620603 198603 2 001

Pembimbing II,



Ratna Wilis, S.Pd, MP
NIP. 19770526 201012 2 003

Ketua Jurusan



Dra. Yurni Suasti, M.Si
NIP. 19620603 198603 2 001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Nama : Yoppie Elymbra Oktarini
NIM : 18487 / 2010

Dinyatakan lulus setelah mempertahankan skripsi didepan Tim Penguji
Program Studi Geografi Jurusan Geografi
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang
dengan judul

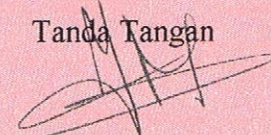
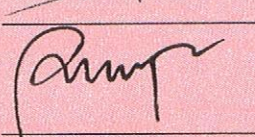
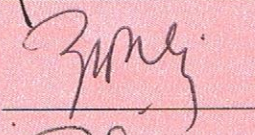
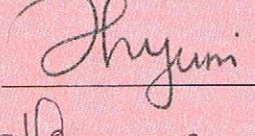
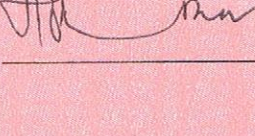
**Dampak Relokasi Ibukota Kabupaten Padang Pariaman Terhadap Kondisi
Sosial Ekonomi Penduduk di Kenagarian Parit Malintang
Kecamatan Enam Lingkung**

Padang, Februari 2016

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Dra. Yurni Suasti, M.Si
2. Sekretaris : Ratna Wilis, S.Pd., MP
3. Anggota : Drs. Helfia Edial, MT
4. Anggota : Ahyuni, ST., M.Si
5. Anggota : Nofrion, S.Pd., M.Pd

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 



**UNIVERSITAS NEGERI PADANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL
JURUSAN GEOGRAFI**

Jalan Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Padang-25131 Telp. 0751-7875159

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yoppie Elymbra Oktarini
NIM/TM : 18487/2010
Program Studi : Geografi
Jurusan : Geografi
Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan, bahwa skripsi saya dengan judul:

**Dampak Relokasi Ibukota Kabupaten Padang Pariaman Terhadap
Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk di Kenagarian Parit Malintang
Kecamatan Enam Lingkung**

Adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di institusi UNP maupun di masyarakat dan Negara.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Diketahui oleh,
Ketua Jurusan Geografi

Dra. Yurni Suasti, M.Si
NIP. 19620603 198603 2 001



Saya yang menyatakan,

Yoppie Elymbra Oktarini
NIM. 18487/2010

ABSTRAK

Yoppie Elymbra Oktarini. 2016. Dampak Relokasi Ibukota Kabupaten Padang Pariaman Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk di Kenagarian Parit Malintang Kecamatan Enam Lingsung. Skripsi. Geografi. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Padang.

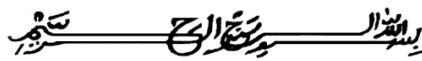
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak relokasi pusat pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman terhadap sosial ekonomi penduduk meliputi: (1) mata pencaharian penduduk, (2) pendapatan penduduk, (3) hubungan kekerabatan penduduk dan (4) ketersediaan prasarana.

Jenis penelitian deskriptif-kuantitatif. Populasi penelitian adalah seluruh rumah tangga yang ada di Kenagarian Parit Malintang, yang terdiri 1.428 kepala keluarga, sampel diambil secara *proposional random sampling* menggunakan rumus Slovin, sehingga diperoleh responden sebanyak 91 kepala keluarga. Data dikumpulkan melalui wawancara dan kuesioner.

Penelitian ini menemukan bahwa relokasi Ibukota Kabupaten Padang Pariaman: (1) belum memberikan dampak yang cukup berarti terhadap perubahan mata pencaharian rumah tangga, terutama mata pencaharian kepala keluarga yang berjenis kelamin laki-laki. Perubahan hanya dialami pada kepala keluarga berjenis kelamin perempuan dan terhadap beberapa ibu rumah tangga. Artinya relokasi pusat pemerintahan hanya berdampak kepada ibu rumah tangga yang berperan sebagai kepala keluarga. (2) berdampak positif terhadap pendapatan rumah tangga terutama yang bersumber dari pendapatan ibu rumah tangga yang berperan ganda, sehingga berdampak juga terhadap rata-rata pendapatan rumah tangga yakni Rp. 3.115.000/ bulan sebelum relokasi dan dan Rp. 3.691.000/ bulan sesudah relokasi Ibukota Kabupaten Padang Pariaman (3) berdampak negatif terhadap hubungan kekerabatan yakni persengketaan lahan antara kerabat. (4) berdampak positif pada ketersediaan prasarana yakni sesudah relokasi jumlah prasarana meningkat dari sebelum relokasi.

Kata Kunci : Relokasi, Sosial, Ekonomi

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Alhamdulillah dengan rasa syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kepada kita sehingga dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: ‘Dampak Relokasi Ibukota Kabupaten Padang Pariaman Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk di Kenagarian Parit Malintang Kecamatan Enam Lingsung’. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana sains pada jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini terelialisasi berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih setulusnya kepada :

1. Pembimbing I, Ibu Dra. Yurni Suasti, M.Si selaku ketua jurusan Geografi Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
2. Pembimbing II, Ibu Ratna Wilis, S.Pd, MP yang telah banyak memberikan saran dan masukan yang membangun sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.
3. Bapak Drs. Helfia Edial, MT, Ibu Ahyuni, ST, M.Si dan Bapak Nofrion, S.Pd, M.Pd selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktu, mencurahkan pikiran dan perhatian untuk menguji demi kesempurnaan skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen staf pengajar Jurusan Geografi FIS UNP, yang selalu memberikan masukan dan saran kepada peneliti hingga skripsi ini selesai.
5. Teristimewa untuk orang tua, ayahanda Jon Hendri dan ibunda Etrianelis, adik Ariefky dan Voni yang telah memberikan doa restu, kasih sayang, semangat, motivasi, dan material sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman seangkatan Geografi NK 2010 yang telah banyak memberikan motivasi dalam merampungkan skripsi ini.
7. Saudara-saudara seperjuangan (my team dan khamchynity) yang telah memberikan dukungan dan semangat berupa canda tawa.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat dan dapat menambah khasanah keilmuan kita bersama. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.

Padang, Februari 2016
Penulis

YOPPIE ELYMBRA OKTARINI

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Batasan Masalah	5
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Kajian Teori	8
1. Relokasi	8
2. Pusat Pemerintahan	9
3. Dampak Sosial Ekonomi Akibat Relokasi Pusat Pemerintahan.....	11
a. Mata Pencapaian.....	13
b. Pendapatan.....	14
c. Hubungan kekerabatan	16
d. Prasarana.....	22
B. Kajian Relevan	23
C. Kerangka Berfikir	26
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian	27
B. Lokasi Penelitian.....	27
C. Populasi dan Sampel	28
1. Populasi	28
2. Sampel	28

D. Variabel dan Data	31
1. Definisi Operasional Variabel	31
a. Mata Pencaharian	31
b. Pendapatan	31
c. Hubungan Kekkerabatan	31
d. Prasarana	31
2. Jenis Data, Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	32
a. Jenis dan Sumber Data	32
b. Teknik Pengumpulan Data	32
E. Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	34
A. Hasil Penelitian.....	34
1. Deskripsi Wilayah	34
2. Demografi Penduduk.....	36
3. Mata Pencaharian	37
4. Penggunaan Lahan di Kenagarian Parit Malintang.....	38
B. Kondisi Sosial Ekonomi.....	39
C. Hasil Temuan	41
1. Karakteristik Informan	41
2. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kenagarian Parit Malintang	42
a. Mata Pencaharian	43
b. Pendapatan	46
c. Hubungan Kekkerabatan	48
d. Prasarana	53
D. Pembahasan	58
1. Dampak perubahan mata pencaharian akibat relokasi Ibukota.....	58
2. Dampak Perubahan Pendapatan Akibat Relokasi Ibukota	59
3. Dampak Perubahan Hubungan Kekkerabatan Akibat Relokasi	60
4. Dampak Ketersediaan Prasarana	60
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN.....	65

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Distribusi Kepala Keluarga di Kenagarian Parit Malintang	28
2. Sampel Responden Penelitian	31
3. Jumlah Penduduk Kenagarian Parit Malintang Menurut Jenis Kelamin ...	36
4. Mata Pencaharian Penduduk Kenagarian Parit Malintang.....	37
5. Penggunaan Lahan di Kenagarian Parit Malintang.....	39
6. Karakteristik Informan Berdasarkan Umur.....	41
7. Tingkat Pendidikan Responden.....	42
8. Mata Pencaharian Kepala Keluarga Sebelum dan Sesudah Relokasi Ibukota	43
9. Mata Pencaharian Ibu Sebelum dan Sesudah Relokasi Ibukota	44
10. Pekerjaan Anak Sebelum dan Sesudah Relokasi Ibukota	45
11. Pendapatan Rumah Tangga Sebelum Relokasi.....	46
12. Pendapatan Rumah Tangga Sesudah Relokasi	47
13. Hubungan Kekerabatan Masyarakat	48
14. Ketersedian Prasarana	53
15. Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual	26
2. Peta Administrasi	35
3. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	36
4. Peta Penggunaan Lahan	39
5. Peta Prasarana Umum Sebelum Relokasi	56
6. Peta Prasarana Umum Sesudah Relokasi	57

DAFTAR LAMPIRAN

1. Instrumen Penelitian.....	65
2. Data Rumah Tangga.....	72
3. Peta Kegiatan Setelah Relokasi.....	80
4. Dokumentasi	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tata pemerintahan yang baik tentu menjadi dambaan semua pihak, baik birokrat ataupun masyarakat. Mutu pelayanan yang diberikan birokrasi akan sangat menentukan kepuasan masyarakat yang akan berdampak langsung pada organisasi tersebut. Salah satu faktor penting dalam upaya memberikan pelayanan yang baik dan lebih maksimal kepada masyarakat adalah aspek kemudahan aksesibilitas masyarakat terhadap Ibukota Pemerintahan serta konektifitas terhadap Kota/Daerah lain.

Mengacu kepada konsep keadilan dan pemerataan, pemerintah melalui PP No. 79 tahun 2008, menyetujui relokasi ibukota daerah Kabupaten Padang Pariaman dari wilayah daerah Kota Pariaman ke Kecamatan Enam Lingkung tepatnya di Kenagarian Parit Malintang. Keputusan tersebut tentu telah mempertimbangkan aspek kelayakan, potensi dan dampak positif dalam jangka pendek dan jangka panjang bagi pembangunan daerah Kenagarian Parit Malintang. Relokasi daerah Ibukota Kabupaten Padang Pariaman telah memperoleh persetujuan dari DPRD Padang Pariaman dengan keputusan Nomor 11/KEP.D/DPRD-2008, tanggal 2 Juli 2008.

Relokasi Ibukota Kabupaten bukan sekedar persoalan pusat pemerintah, namun hal ini merupakan perubahan yang sangat mendasar, yakni perubahan paradigma lama Ibukota Kabupaten sebagai pusat seluruh aktivitas pemerintahan ke paradigma baru bahwa Ibukota Kabupaten direncanakan sedemikian rupa untuk menjadi pusat pelayanan. Dari sisi nasional, hal ini

sekaligus diharapkan mampu mengatasi ketimpangan pembangunan dengan merencanakan pembangunan yang lebih merata dan seimbang.

Ibukota Kabupaten merupakan suatu perwilayahan pusat atau sentral pengendalian pembangunan yang akan mendorong terjadinya pertumbuhan secara seimbang antara kota dengan desa atau antara desa dengan desa yang bersinergis. Dan merupakan wilayah pusat keseimbangan regional yaitu daya dukung suatu potensi wilayah tergantung kepada keseimbangan penyebaran penduduk yang memperoleh peluang yang sama terhadap demografi ekonomi sosial dan lingkungan untuk mewujudkan seluruh potensi yang dimiliki dapat menghasilkan suatu jaminan kualitas dan keadilan pelayanan publik (Hamid, 2008).

Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah memberikan kewenangan yang luas dan nyata kepada daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Terkait dengan hal tersebut dalam menentukan ibukota sebagai pusat pemerintahan harus dilakukan suatu penilaian yang objektif yang didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu dengan memperhatikan aspirasi masyarakat. Kriteria-kriteria yang perlu mendapat penilaian dalam menentukan calon Ibukota tersebut antara lain adalah aspek tata ruang, aksesibilitas, keadaan fisik, kependudukan dan ketersediaan fasilitas.

Fungsi kota dicerminkan oleh kelengkapan dan kualitas fasilitas pelayanan perkotaan yang dimilikinya, disamping itu kota ditinjau dari segi aksesibilitasnya ke kota-kota lain atau wilayah belakangnya. Kenagarian Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung sebagai lokasi baru pusat

pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman mengalami perkembangan, hal ini dapat dilihat dari penambahan kegiatan ekonomi utama, seperti perdagangan, transportasi dan jasa..

Sejarah menunjukkan, sekalipun tempat yang dipilih sebagai pusat pemerintahan adalah hasil pertimbangan yang seksama, tetapi pusat pemerintahan adakalanya dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Relokasi pusat pemerintahan terjadi karena berbagai alasan atau pertimbangan, baik menyangkut kepentingan strategis maupun menyangkut masalah politik dan kepentingan sosial ekonomi.

Terkait relokasi lokasi pusat pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman yang sebelumnya berada di daerah Kota Pariaman di relokasi ke Kecamatan Enam Lingkung tepatnya di Kenagarian Parit Malintang tentu akan membawa perubahan dalam berbagai aspek khususnya aspek sosial ekonomi yang cenderung akan terjadi di daerah relokasi pusat pemerintahan.

Berdasarkan pengamatan awal dilapangan, terlihat dampak perubahan akibat relokasi ibukota di Kenagarian Parit Malintang. Salah satunya mata pencaharian masyarakat yang sebelumnya bertani berubah menjadi seperti pedagang asongan, ojek dan menyediakan pelayanan jasa (*photocopy*, penjahit, *cleaning servis*). Selain itu terlihat juga penggunaan lahan yang berubah dimana pada awalnya yang semula lahan tersebut berupa kebun dan semak belukar sekarang menjadi bangunan-bangunan. Disamping itu juga terjadi perubahan sistem pelayanan masyarakat disekitar lokasi pusat

pemerintahan, termasuk juga lembaga-lembaga sosial masyarakat yang ada disekitarnya.

Relokasi Ibukota Kabupaten Padang Pariaman juga berpengaruh pada ketersediaan prasarana, keterjangkauan pelayanan masyarakat dimana yang sebelumnya Ibukota Kabupaten Padang Pariaman yang berada di Kota Pariaman sekarang berada di Parit Malintang. Otomatis masyarakat pun berpindah dalam urusan pelayanan termasuk mobilitas, aksesibilitas, keterjangkauan, dan prasarana.

Pemilihan lokasi pusat pemerintahan tidak sembarangan, tetapi hasil pertimbangan secara seksama agar mendatangkan manfaat. Berdasarkan keberadaan pusat pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman yang baru di Kenagarian Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung, maka peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan di atas dengan judul **“Dampak Relokasi Ibukota Kabupaten Padang Pariaman Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk di Kenagarian Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung”**.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dari latar belakang di atas adalah mengenai :

1. Dampak relokasi pusat pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman terhadap mata pencaharian masyarakat di Kenagarian Parit Malintang?
2. Dampak relokasi pusat pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman terhadap pendapatan masyarakat di Kenagarian Parit Malintang?

3. Dampak relokasi pusat pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman terhadap dari hubungan kekerabatan?
4. Dampak relokasi pusat pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman terhadap dari ketersediaan prasarana di Kenagarian Parit Malintang?
5. Dampak relokasi pusat pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman terhadap dari aspek keterjangkauan pelayanan?
6. Dampak relokasi pusat pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman terhadap kebiasaan dan tradisi masyarakat?
7. Dampak relokasi pusat pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman terhadap lembaga-lembaga sosial di Kenagarian Parit Malintang?
8. Dampak perubahan penggunaan lahan pasca relokasi pusat pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas banyak dampak dari relokasi pusat pemerintahan, mengingat keterbatasan dana, waktu, dan tenaga maka penulis mencoba mengerucutkan persoalan agar lebih memudahkan objek penelitian dan menghindari luasnya pembahasan yang dilakukan. Maka masalah dalam penelitian ini dibatasi pada : (1) mata pencaharian, (2) pendapatan, (3) hubungan kekerabatan, (4) prasarana.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pengaruh relokasi ibukota Padang Pariaman terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, dengan fokus kajian :

1. Dampak relokasi pusat pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman terhadap mata pencaharian masyarakat di Kenagarian Parit Malintang.
2. Dampak relokasi pusat pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman terhadap pendapatan masyarakat di Kenagarian Parit Malintang.
3. Dampak relokasi pusat pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman terhadap hubungan kekerabatan di Kenagarian Parit Malintang.
4. Dampak relokasi pusat pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman terhadap ketersediaan prasarana.

E. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dampak relokasi pusat pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman terhadap mata pencaharian masyarakat..
2. Menganalisis dampak relokasi pusat pemerintahan Kabupaten padang Pariaman terhadap pendapatan masyarakat.
3. Menganalisis dampak relokasi pusat pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman terhadap ketersediaan prasarana.
4. Menganalisis dampak relokasi pusat pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman terhadap hubungan kekerabatan masyarakat.

F. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan nantinya akan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi instansi terkait, hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu bahan rujukan/ informasi dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam upaya pengembangan wilayah.

2. Bagi masyarakat, sebagai bahan informasi dalam pemanfaatan pelayanan pemerintah di Kabupaten Padang Pariaman.
3. Dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan acuan untuk melakukan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan pelayanan pemerintah dan pengembangan wilayah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Belum memberikan dampak yang cukup berarti terhadap perubahan mata pencaharian rumah tangga, terutama mata pencaharian kepala keluarga yang berjenis kelamin laki-laki. Perubahan hanya dialami pada kepala keluarga berjenis kelamin perempuan dan terhadap beberapa ibu rumah tangga. Artinya relokasi pusat pemerintahan mempunyai dampak positif terhadap hanya berdampak kepada ibu rumah tangga yang berperan sebagai kepala keluarga.
2. Berdampak positif terhadap pendapatan rumah tangga terutama yang bersumber dari pendapatan ibu rumah tangga yang berperan ganda, rata-rata pendapatan sebelum relokasi Rp. 3.115.000/ bulan dan rata-rata sesudah relokasi Rp. 3.691.000/ bulan.
3. Berdampak negatif terhadap hubungan kekerabatan yakni persengketaan lahan antara kerabat.
4. Berdampak positif pada ketersediaan prasarana yakni sesudah relokasi jumlah prasarana meningkat dari sebelum relokasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian maka disarankan sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah, sebisa mungkin meminimalisir perubahan negatif akibat Relokasi Ibukota Kabupaten Padang Pariaman di Kenagarian Partit

Malintang. Selain itu juga pemerintah mampu mengembangkan wilayah dan memberdayakan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah Ibukota. Pemerintah juga harus menyediakan praprasarana yang layak di pusat Ibukota.

2. Bagi masyarakat, sebisanya masyarakat mampu berkreaitif untuk membuka lapangan usaha sendiri agar pendapatan meningkat dan mampu memanfaatkan prasaran yang ada dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. 1994. *Sosiologi Skematika Teori dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ambarita, Bonar, Zeitsel. 2010. *Dampak Relokasi Pusat Pemerintahan Kabupaten Simalungun Terhadap Pengembangan Wilayah Kecamatan Raya*. USU
- Arikunto, Suharsini. 2006. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Bina Aksara
- Arikunto, Suharsini. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Bina Aksara: *Teori dan Praktik*. Jakarta: EGC.
- Harun, Rochajat dan Ardianto Elvinaro. 2011. *Komunikasi Pembangunan Perubahan sosial*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Bakaruddin. 2011. *Perkembangan dan Permasalahan*. Padang: UNP
- Breath, I Ynoman. 2000. *Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Martanto, Fahrudin, Aritua, Saut, Sagala. 2010. “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persoalan Relokasi Pasca Bencana Lahar Dingin di Kali Putih*”. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota B SAPPK V3NI.
- Friedman, Milton. Marilyn. 1998. *Keperawatan Keluarga*
- Jayadinata, Johara T. 1999. *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan wilayah*. Bandung: ITB
- Jhingan M, L. 2012. *ekonomi pembangunan dan perencanaan*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Kamus Besar bahasa Indonesia. 2002. *Pelayanan*. Jakarta: Gramedia.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi & Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Nawawi, Hadari. 1995. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: UGM Press.
- Setiadi, Elly, M dan Kolip Usman. 2010. *Pengantar sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana Prenda Media Group.
- Soekanto, soerjono. 2003. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.